

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adjie, I. S. (2011). *Pergeseran Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Adjie, I. S. (2012). *Korupsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Penerbit Diadit Media.
- Chazawi, A. (2018). *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Penerbit Prenadamedia Group.
- Hamzah, A. (2007). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Handoko, P. (2006). *Menakar Jaminan Atas Tanah Sebagai Pengaman Kredit*. Jember: Penerbit Centre for Society Studies.
- Harahap, Y. (2003). *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. . (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka.
- Kuncoro, M. (2002). *Manajemen Perbankan: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.
- Neloe, E. C. W. (2012). *Pemberian Kredit Bank Menjadi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Verbum Publishing.
- Nirwanto, A. (2015). *Asas Kekhususan Sistematis Bersyarat Dalam Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Penerbit PT Alumni.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Pahami dan Hindari Tindak Pidana Perbankan*. Jakarta: Penerbit Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan.

Subekti. (1982). *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.

Suyatno, T. (1990). *Dasar-Dasar Perkreditan* (Cetakan Ke.). Jakarta: Penerbit Gramedia.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).

Wiyono, R. (2005). *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel

Bukara, M. P. (2016). Pemberantasan Tindak Pidana Perbankan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Lex Crimen*, 5.

Hasibuan, Muhammad Haris Sofian, Kalo Syafruddin, Purba, Hasyim, Mulyadi, M. (2022). Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Kejahatan Manipulasi Data Agunan Dalam Pengajuan Kredit Pada Bank BUMD. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1).

Hikmawati, P. (2019). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? *Jurnal Negara Hukum*, 10(1).

Ifrani, I. (2016). Grey Area Antara Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Perbankan. *Jurnal Konstitusi*, 8(6).

Ismansyah. (2007). Penerapan dan Pelaksanaan Pidana Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Demokrasi*, 6(2).

Khalimi. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan. *Jurnal Yustisia*, 8(1).

Latifah, M. (2015). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 6(1).

Nasution, M. I. (2015). Pola Pertanggungjawaban Pidana Bank Kaitannya Dengan Tindak Pidana Perbankan. *Adliya*, 9(pasal 48), 317–338.

Rambey, G. (2016). Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Melalui Pembayaran Uang Pengganti dan Denda. *Jurnal De Lega Lata*, 1(1).

Saputro, H. J. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindak Pemblokiran dan Perampasan Aset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Jurnal Mizan Of Islamic Law*, 5(2).

Situmorang, M. (2014). Harmonisasi Hukum Nasional Di Bidang Korupsi Dengan United Nations Convention Against Corruption. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3).

Sulistiyawan, A. Y., Fahrezi, A., & Atmaja, P. (2021). Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Di Pengadilan Untuk Menghindari “Onvoldoende Gemotiveerd.” *Jurnal Ius Constituendum*, 6(2).

Yasid, M., & Ramayanti, R. (2019). Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Darma Agung*, 27(3).

C. Penelitian atau Tugas Akhir

Firstanier, R. A. “Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Pejabat Bank Pada Bank Pembangunan Daerah Dalam Penyaluran Kredit”, Skripsi., Universitas Brawijaya Malang, 2018.

Siregar, Ningsi Putri. “Penerapan Asas Sistematis Spesialis Sebagai Ketentuan Spesialis Pidana Perbankan Menjadi Tindak Pidana Korupsi”, Skripsi., Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021.

Syahrir, A. S. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perbankan Yang Terjadi Di Kota Makassar (Studi Kasus Putusan Nomor 404/Pid.B/2011/PN.Mks)”, Skripsi., Universitas Hasanuddin Makassar, 2011.

D. Internet

Sumut, Bank. “Sejarah Nama Bank Sumut,” 2021.
<https://www.banksumut.co.id/sejarah-bank-sumut/>.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

F. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 3 Februari 2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 84/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Mdn.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2022/PT.Mdn.